

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka dilakukan pengkajian mendalam atas perlunya perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah dengan adanya pemahaman aparatur Pemerintah tentang penerapan prinsip akuntabilitas kinerja *good governance*.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasawarsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan Pemerintahan dianggap tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari pemerintah.

Kompleksitas layanan yang semakin tinggi membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Menurut Sedarmayanti (2007:67) kinerja organisasi Pemerintah Daerah selalu merupakan sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut

menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan. Masyarakat mulai berani menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah. Tuntutan tersebut diutarakan karena masyarakat merasa belum puas atas kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Tuntutan akan peningkatan kinerja organisasi pemerintah tersebut tidak hanya pada tingkat pusat akan tetapi juga meluas sampai ke tingkat daerah. Hal tersebut tentunya merupakan suatu tantangan besar bagi seluruh jajaran lembaga atau instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Mengingat sumber daya aparatur pemerintah merupakan unsur yang strategis dalam menentukan produktivitas kerja suatu organisasi dan sehat atau tidaknya suatu organisasi publik, maka diperlukan pemahaman prinsip Akuntabilitas Kinerja *Good Governance* agar dapat mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah yang bertanggung jawab, terencana dan berkelanjutan yang merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena keberhasilan akuntabilitas tergantung pada sejauh mana pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai prinsip akuntabilitas.

Rakyat mengharapkan lahirnya *good gavernance* dan mereka paham jika Pemerintahan yang baik itu antara lain dapat terwujud dengan adanya Pemerintahan yang profesional. Menurut Sedarmayanti (2004:50-55) profesionalisme aparatur pemerintah daerah salah satunya adalah akuntabilitas aparatur. Akan tetapi dalam perjalanannya masih banyak hal-hal yang

menyimpang. Seperti salah satunya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun realitasnya, di daerah justru muncul “raja-raja kecil”. Kita contohkan saja misalnya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad Sampurnajaya di Propinsi Lampung terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Lampung tengah senilai 28 miliar dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang. ([http://tribunnews.com/14 Mei 2012](http://tribunnews.com/14%20Mei%202012))

Terkait dalam hal ini, akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam mewujudkan *good governance*. Maka sudah sepatutnya setiap aparatur pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki pemahaman yang mencukupi tentang prinsip-prinsip *good governance*. Menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan guna menindaklanjuti segala tindakan yang tidak lain adalah melayani dan mengatur kehidupan masyarakat.

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder* tentang seberapa jauh tingkat pertanggung jawaban pimpinan aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya. Maka pilihan terhadap pelaksanaan kinerja mengingat Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru, yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk Tulang Bawang. Aparatur pemerintah daerah harus ada pertanggungjawabannya.

Dalam memenuhi kehendak dan aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan prima dari aparatur pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat harus adanya pemahaman tentang penerapan prinsip akuntabilitas kinerja *good governance*. Aparatur Pemerintah Daerah harus ada pertanggungjawabannya.

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didukung oleh 663 pegawai negeri sipil. Semuanya tersebar diberbagai instansi yang terdiri dari 15 pegawai Kelurahan, 107 pegawai Kecamatan, 241 pegawai Dinas, 183 pegawai Badan/Kantor, dan 117 pegawai Sekretariat. Dari jumlah pegawai PNS tersebut memiliki tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, seperti diketahui tanpa keterangan sebanyak 2,72% atau 18 orang, paket B sebanyak 0,15% atau sebanyak 1 orang, SD sebanyak 0,45% atau 3 orang, SMP sebanyak 0,90% atau 6 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 14,4% atau 95 orang, D3 sebanyak 15,7% atau 104 orang, S-1 sebanyak 56,1%, atau 372 orang, S-2 sebanyak 7,5% atau 50 orang. (Badan Kepegawaian Daerah tahun 2011)

Melihat dari tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Daerah yang didominasi dari lulusan S1 mencapai 56%, seyogyanya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memiliki tingkat pemahaman akuntabilitas yang baik. Namun tidak seperti yang ada di lapangan, ternyata tingkat pemahaman akuntabilitas masih rendah hal ini berdasarkan dari hasil prariset dari kuesioner yang peneliti lakukan sebelumnya sebagai sampel penelitian dengan menggunakan alat ukur pelaksanaan akuntabilitas.

Sampel yang digunakan pada prariset sebelumnya yaitu pada Dinas Kesehatan 6 informan, Badan Kepegawaian Daerah 3 informan, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 8 informan, Kecamatan Tumijajar 4 informan. Dari hasil prariset sementara dilapangan terlihat bahwa para pegawai dalam menjawab hasil pertanyaan banyak lulusan S1 perguruan tinggi swasta yang menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaan kuesioner namun ada beberapa lulusan D3 dengan perguruan tinggi negeri hasil jawaban sudah cukup baik. Data hasil prariset Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Tumijajar yang ada hanya sebagai contoh dalam penelitian ini, dalam penelitian ini penulis terfokus pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 14 aparatur, Dinas Pendidikan yang terdiri dari 25 aparatur, Dinas Kesehatan yang terdiri dari 44 aparatur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terdiri dari 16 aparatur, Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari 11 aparatur, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 15 aparatur.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa pada kenyataannya pemahaman akuntabilitas dan pelaksanaannya belum maksimal. Misalnya masih banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya prosesnya berbelit-belit, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akan pelayanan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil prariset di lapangan bahwa Pemerintah daerah Tulang Bawang Barat ternyata tingkat pemahaman akuntabilitasnya masih rendah, yang merupakan sampel sebagai contoh dalam penelitian ini. hal ini akan berpengaruh terhadap sitem pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan rendahnya

pemahaman akuntabilitas akan membuat sistem *good governance* berjalan tidak sehat. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan administrasi laporan pertanggungjawaban terhadap para pegawai pemerintahan. Hal ini sangatlah penting menjadi bekal para pegawai agar jauh lebih baik lagi, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap prinsip akuntabilitas kinerja *good governance*. Hal ini sangat diperlukan guna menunjang program pemerintah pusat agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pelayanan yang baik kepada masyarakat akan baik dengan pemerintahan yang akuntabilitas yang baik pula. Hal ini akan bermanfaat juga bagi para instansi di dalamnya agar tidak terjadi tindakan korupsi yang berakibat merugikan negara dan berujung pada masyarakat. Maka peneliti telah meneliti lebih lanjut tentang pemahaman aparatur Pemerintah Daerah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas?
3. Apakah pendidikan dan pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/Badan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Untuk menguji apakah pendidikan dan pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan wacana pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai prinsip-prinsip *good governance* khususnya akuntabilitas.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini mampu meningkatkan kinerja aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/Badan Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah terkait dalam pemahaman aparatur pemerintah mengenai prinsip-prinsip *good governance* khususnya akuntabilitas.